

RENJA PERUBAHAN

2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sehingga dapat tersusun.

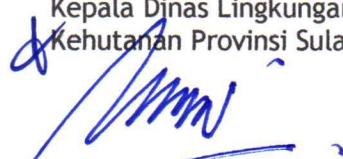
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, serta memperhatikan isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Terdapat empat tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu 1) meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah, 2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, 3) menurunkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, 4) meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, sehingga rencana kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran) pada tahun 2024 agar terwujud sinkronisasi dan konsistensi perencanaan

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, tersusun dengan baik.

Makassar, Agustus 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



Ir. ANDI HASBI, M.T
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 196504271992031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	6
2.1 Evaluasi Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2024	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	47
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	48
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	63
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	53
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	66
3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	68
3.4 Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	70
3.5 Program dan Kegiatan	72
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan	80
BAB V Penutup	97
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	97
5.2 Rencana tindak lanjut	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 Triwulan II (TC-29)	17
Tabel 2	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Sulsel (TC-30)	40
Tabel 3	Rasio luas kawasan hutan lindung terhadap total kawasan hutan.....	45
Tabel 4	Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2022 (TC-31)	49
Tabel 5	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024	63
Tabel 6	Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.....	67
Tabel 7	Target Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	70
Tabel 8	Keterkaitan RPD dan Renstra	71
Tabel 9	Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	71
Tabel 10	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (TC-33)	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Indeks Kualitas Udara	8
Grafik 2	Indeks Kualitas Air	9
Grafik 3	Indeks Kualitas Air Laut	11
Grafik 4	Perkembangan perhutanan sosial 2023	41
Grafik 5	Perkembangan skema perhutanan sosial	42
Grafik 6	Kelompok Perhutanan Sosial	42
Grafik 7	Kerusakan Kawasan Hutan	43
Grafik 8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	44
Grafik 9	Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	45
Grafik 10	Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan.....	46
Grafik 11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Prov Sulawesi Selatan	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sistematis perangkat daerah sebagai proses terstruktur yang dirancang untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi program dan kegiatan pemerintah di tingkat perangkat daerah akan memberi acuan yang jelas dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks rencana pembangunan yang komprehensif harus mengintegrasikan input dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan strategi yang inklusif dan responsif terhadap dinamika yang ada.

Perencanaan pembangunan mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah jangka pendek (tahunan) merupakan menjabarkan perencanaan menengah pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat dan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, akses pengambilan kebijakan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 15 dan disusun melalui koordinasi, sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis tahunan mencakup urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan pada tahun 2024, yang memuat kebijakan anggaran daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan pengurangan anggaran program dan kegiatan.

Perubahan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil



evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, serta dinamika kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter.

Beberapa program strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026, dengan demikian dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPPD) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahunan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan Tahun Anggaran 2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.



7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026
19. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun dengan maksud untuk sebagai pedoman dan acuan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
 - a. Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026
 - b. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi maupun melalui DAK tahun 2024
 - c. Acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024



- d. Sebagai tolok ukur penilaian/evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat

Bab V. Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Rencana Kerja Perubahan serta kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

TRIWULAN II

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Melalui evaluasi, informasi dan data yang diperoleh selama pelaksanaan program dianalisis untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang memerlukan perbaikan. Pertimbangan dan arahan masukan terhadap pencapaian program kerja untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang sekaligus penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 Triwulan II sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 Triwulan II

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, meliputi urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan yang meliputi :

a. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup merujuk pada kondisi dan keseimbangan berbagai elemen alam seperti udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditandai dengan suatu ukuran untuk menilai kondisi lingkungan dan disebut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya untuk mengurangi tingkat polusi udara, meningkatkan kebersihan sumber daya air, upaya untuk mengurangi pencemaran air laut, serta meningkatkan tutupan lahan.



Indikator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tersebut yaitu :

1. Indikator Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. IKU menggabungkan data dari berbagai polutan atmosfer, seperti partikel halus (PM_{2.5} dan PM₁₀), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), dan ozon (O₃), untuk memberikan skor yang menunjukkan tingkat pencemaran udara. Sumber polusi udara yang utama selama ini berasal dari transportasi dimana hampir 60% dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbonmonoksida (CO) dan sekitar 15% terdiri hidrokarbon (HC).

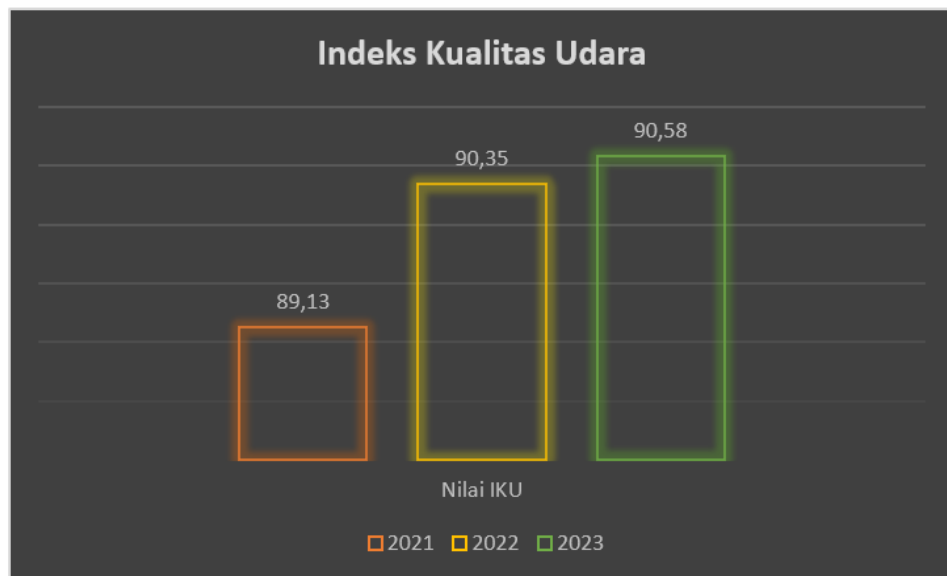
Untuk memperoleh ukuran kualitas udara tersebut dilakukan pemantauan udara pada kawasan strategis yang mewakili kondisi udara suatu wilayah. Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara untuk memperoleh hasil perhitungan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sampai dengan triwulan II realisasinya masih 0 %. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koordinator pemantauan udara, menkoordinir proses kegiatan pemantauan 24 kabupaten/kota di 4 (empat) lokasi titik pemantauanya itu kawasan perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi dengan metode *passive sampler* untuk mendapatkan sampel uji kualitas udara. Hasil sampel tersebut nantinya akan diuji di laboratorium yang terakreditasi dan teregister di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan untuk mendapatkan data hasil uji yang digunakan menghitung nilai Indeks Kualitas Udara Sulawesi Selatan Tahun 2024. Dengan demikian Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 Triwulan II masih 0 dari target 89,45 poin.

Indeks Kualitas Udara Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat dari tahun 2021 hingga 2023 dan termasuk kategori “Sangat Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di Provinsi Sulawesi selatan masih terjaga dan perlu dijaga konsistensinya. Indeks Kualitas Udara tahun 2023 dengan nilai 90,58 poin, dan jika dibandingkan dengan nilai IKU Nasional pada

tahun 2023 berada diatas nilai IKU Nasional sebesar 1.91 poin dari nilai IKU Nasional sebesar 88.67 poin.

Indeks kualitas udara 3 tahun terakhir (2021-2023) disajikan pada grafik berikut :

Grafik 1
Indeks Kualitas Udara



2. Indikator Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas air berdasarkan beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi. Pemantauan kualitas air dengan menggabungkan data dari berbagai indikator, seperti pH, kadar oksigen terlarut, dan kontaminan, maka IKA memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan ekosistem perairan, tentang seberapa baik atau buruknya kualitas air untuk keperluan tertentu, seperti untuk konsumsi manusia, irigasi, atau habitat bagi organisme akuatik. Melalui pemantauan berkala dan evaluasi IKA, kita dapat mendorong tindakan konservasi yang lebih efektif, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Tahun 2024 triwulan, nilai Indeks Kualitas Air masih dalam proses verifikasi data Kab/Kota dan proses penghitungan nilai Indeks Kualitas Air Sulawesi Selatan. Namun hasil akhir belum bisa diperoleh karena



masih dalam tahap pengumpulan data, sehingga hasil akhir penghitungan Indeks Kualitas air Triwulan I realisasinya masih 0 % dari target 57,00 poin

Secara keseluruhan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan nilai IKA Nasional pada tahun 2023 berada diatas nilai IKA Nasional. Dimana capaian IKA Provinsi sebesar 57.95 poin atau 3.36 poin lebih dari nilai IKA Nasional sebesar 54.59 poin.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 57.95 poin atau mengalami peningkatan 0,16 poin dari tahun 2022 sebesar 57,79 poin. Tren Indeks Kualitas Air menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2023, dan termasuk kategori “Sedang”. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air berada pada tingkat yang cukup baik tetapi masih memerlukan perhatian dan diperlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan langkah-langkah perbaikan untuk menjaga kualitas air agar tetap berada dalam kisaran yang aman dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Indeks Kualitas Air kurun waktu 3 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2
Indeks Kualitas Air





3. Indikator Indeks Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah alat untuk menilai dan memantau kualitas air laut berdasarkan berbagai parameter yang relevan dengan ekosistem laut. Berbeda dengan air tawar, kualitas air laut dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus seperti salinitas, suhu, dan konsentrasi nutrisi. Pengambilan sampel air laut merupakan hal yang penting dalam uji kualitas air laut karena contoh air laut merupakan cerminan dari populasi yang ada dan harus mewakili keadaan air di lokasi pengambilan sampel.

Capaian nilai Indeks Kualitas Air Laut tahun 2024 triwulan II, masih 0 % dari target 85,68 poin. Pelaksanaan kegiatan pemantauan sampai triwulan II Tahun 2024 masih dalam proses penetapan jadwal pemantauan yang dilakukan bersama Tim IKAL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan ini masih dalam perencanaan pemantauan yang dilakukan oleh kementerian karena lokasi pemantauan sebaiknya dilakukan sama atau lebih dari titik pantau yang sudah ditetapkan oleh kementerian.

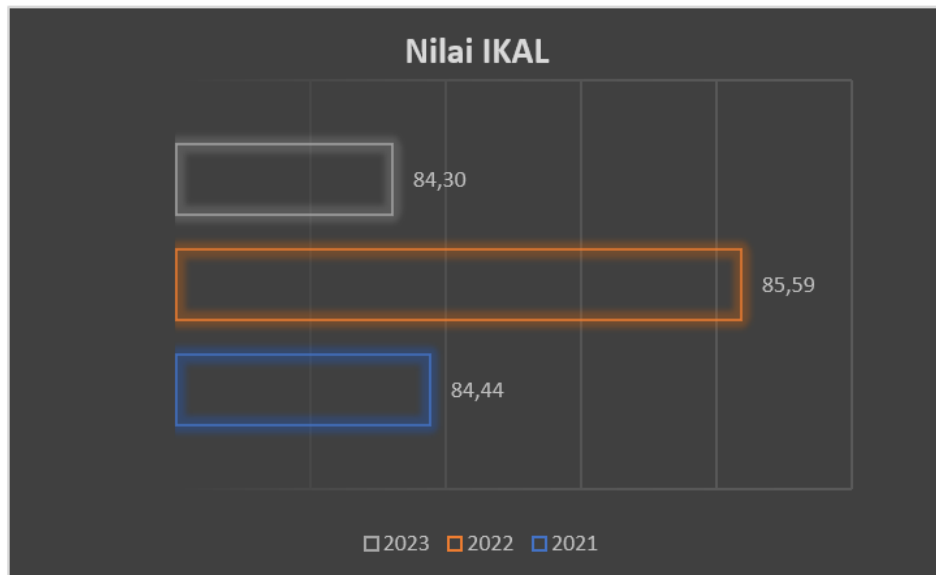
Nilai Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Sulawesi selatan berada pada kriteria “Baik” hal ini dipengaruhi oleh kondisi kualitas air laut di 19 Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah laut di Provinsi Sulawesi Selatan hampir semuanya berada pada kriteria “Baik”. Capaian nilai Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan nilai IKAL Nasional pada tahun 2023 berada diatas nilai IKAL Nasional. Dimana capaian IKAL Provinsi sebesar 84.30 poin atau 5.46 poin lebih dari nilai IKAL Nasional sebesar 78.84 poin.

Namun tren nilai Indeks Kualitas Air Laut kurun waktu 3 tahun (2021-2023) terakhir menunjukkan penurunan dari 2022 sebesar 85,59 poin menjadi 84,30 poin pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi peningkatan polusi, perubahan kondisi lingkungan, atau dampak aktivitas manusia yang belum signifikan tetapi mulai mempengaruhi kualitas air. Meskipun kategori kualitas masih tergolong Baik, penting untuk terus memantau dan mengidentifikasi penyebab penurunan guna



memastikan kualitas air laut tetap terjaga dan mengantisipasi potensi masalah di masa depan

Grafik 3
Indeks Kualitas Air Laut



4. Indikator persentase beban pencemaran dari sumber tertentu

Penurunan beban pencemaran merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, pengendalian emisi dari berbagai sumber, seperti industri, kendaraan, dan pembangkit listrik, memainkan peran kunci dengan menerapkan teknologi yang lebih bersih dan mematuhi regulasi emisi yang ketat.

Capaian indikator persentase pencemaran dari sumber tertentu tahun 2024 triwulan II mencapai 13,68 % atau 11.949,62 ton.

Target Penurunan Beban Pencemaran Tahun 2024 (Ton/Tahun)	Target 2024 (Persentase)	Realisasi Penurunan beban pencemaran TW. II (ton/3 bulan)	Realisasi TW.II (Persentase)
Air Limbah : 23.640,32	27,05%	11.820,16	13,53%
Emisi : 258,92	0,3%	129,46	0,15%
Total : 23.899,24	27,35%	11.949,62	13,68%

Dalam kurun 3 tahun terakhir capaian indikator persentase pencemaran dari sumber tertentu, yaitu persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 Persentase kinerja penurunan beban



pencemaran dari sumber tertentu sebesar 1.9%, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 27% dan tahun 2023 menjadi 30%.

b. Sasaran menurunnya potensi penurunan emisi GRK sektor limbah dengan indikator:

1. Indikator jumlah penurunan emisi GRK sektor limbah

aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah yang dilakukan inventarisasi antara lain TPS 3R, TPST, Bank Sampah, Pengomposan serta didukung dengan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2023 sebesar 0,37 persen yang diperoleh dari sejumlah kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK yaitu kegiatan TPS3R sebesar 135,87 Ton CO₂ Eq, TPST sebesar 155,65 Ton CO₂ Eq, Rumah Kompos sebesar 2.871,87 Ton CO₂ Eq, Bank sampah sebesar 566,77 Ton CO₂ Eq, ProKlim sebesar 159,07 Ton CO₂ Eq serta sektor informail (pengepul) sebesar 1.370,21 Ton CO₂ Eq. Total jumlah penurunan Emisi GRK pada tahun 2021 sebesar 13.096,23 Ton CO₂ Eq.

No	Kegiatan	Jumlah Penurunan Emisi (Ton CO ₂ Eq)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	TPS3R	325,07	3,77	53,38	667,88	135,87
2	TPST	2,85	1,78	765,8	5.271,15	155,65
3	Rumah Kompos	0,133	0,778	309,67	1.120,37	2.871,87
4	Bank Sampah	0,342	1.328,67	200,28	486,47	566,77
5	ProKlim	0	0	3.895,29	251,77	159,07
6	Aplikasi Aksara	163,92	778,29	1.911	0	7.836,79
7	Sektor Informal (Pengepul)				6.329,08	1.370,21
Total		7.135,42	14.126,72			13.096,23

c. Sasaran menurunnya emisi GRK sektor kehutanan

1. Indikator Jumlah penurunan emisi GRK sektor kehutanan

Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar semua bangsa pada saat ini. Perubahan iklim, yang salah satu faktor utama penyebabnya adalah emisi gas rumah kaca (GRK), menimbulkan beberapa dampak nyata seperti kenaikan suhu bumi. Fenomena ini juga menyebabkan anomali cuaca, yang mengakibatkan berkembangnya wabah penyakit seperti malaria, gagal panen beberapa komoditi pertanian, juga bencana kekeringan dan banjir di beberapa wilayah di dunia.



Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan memerlukan pendekatan multifaset yang fokus pada konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah reforestasi dan rehabilitasi hutan, yang tidak hanya meningkatkan penyerapan karbon di atmosfer tetapi juga memperbaiki kualitas tanah dan mendukung keanekaragaman hayati.

Capaian penurunan emisi GRK sektor kehutanan 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun	Emisi GRK sektor hutan dan lahan (ton CO ₂ eq)	Keterangan
2019	95.584,530	
2020	3.351,435	
2021	9.109,273	
2022	85.889,273	
2023	223.396,390	Data sementara (belum terverifikasi aksara)

2. Indikator Rekomendasi pemulihan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan atau dalam daerah kabupaten/kota

Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan rehabilitasi ekosistem, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan partisipasi komunitas. Rekomendasi utama termasuk penanaman vegetasi untuk mencegah erosi dan meningkatkan kualitas air, pengendalian pencemaran dengan memperbaiki sistem pengelolaan limbah, serta pengaturan penggunaan lahan yang bijaksana untuk mencegah deforestasi dan konversi lahan yang merusak.

Capaian indikator rekomendasi DAS lintas daerah kabupaten/kota atau dalam daerah kabupaten/kota tahun 2024 triwulan II, yaitu berupa kegiatan pembuatan tanaman mangrove serta pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air yang tersebar di beberapa kabupaten/kota merupakan kegiatan pemulihan DAS di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Sasaran terpeliharanya fungsi hutan

1. Indikator persentase kawasan hutan kewenangan provinsi yang dipertahankan fungsinya.



Kawasan hutan kewenangan provinsi Sulawesi Selatan mencakup kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Luas kawasan hutannya mencapai 1.780.028 ha atau 68,19 % dari luas kawasan hutan provinsi Sulawesi Selatan. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang masih di pertahankan fungsinya sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 362 Tahun 2019 tanggal 28 mei 2019 yang dimutakhirkan dengan SK. 6626/MenLHK/PKTL-Pla.2/10/2021.

Untuk memenuhi fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi sesuai peruntukannya, penting menerapkan pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan hutan. Terpeliharanya fungsi hutan dengan meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan dilakukan melalui pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dari kebakaran hutan, illegal logging, perambahan hutan.

Kerusakan kawasan hutan Tahun 2020 hingga 2022 persentase luas kerusakan hutan mengalami tren menurun, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 0,05 dari tahun 2022 sebesar 0,03 persen. Kerusakan kawasan hutan terbesar tahun 2023 yaitu kebakaran hutan yang mencapai luas 910,70 ha. Kondisi ini dipengaruhi kejadian alam El Nino yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Selatan yang berdampak pada naiknya suhu bumi dan kemarau panjang/kurangnya curah hujan, sehingga memengaruhi peningkatan hotspot, yang merupakan salah satu faktor penyebab kebakaran hutan dan kabut asap, akan tetapi upaya pengamanan dan perlindungan hutan berupa patroli dan penyuluhan berupa sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan terus dilakukan. Luas kerusakan hutan tahun 2020 hingga tahun 2023 sebagai berikut :

No	Kerusakan Kawasan Hutan	Tahun (ha)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kebakaran Hutan	5,00	7,00	55,85	910,70
2	Perambahan Hutan	12.435,00	1.424,49	471,94	8,4
3	Perladangan berpindah			53,00	
3	Pertambangan tanpa izin		0,50	0,0003	
4	Lahan kritis				
	Total Kerusakan Hutan	12.440,00	1.431,99	580,79	919,10



- e. Sasaran Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan
 - 1. Indikator persentase akses kelompok masyarakat dan swasta yang melakukan usaha kehutanan

Akses usaha kehutanan dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan diatur secara ketat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan penerapan izin usaha yang jelas dan terstruktur. Capaian indikator akses kelompok masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan tahun 2024 triwulan II mencapai 2,08 %, dengan keterlibatan para pihak pemanfaatan hutan melalui perjanjian kerjasama operasional pemanfaatan hutan mencapai 22 mitra Kerjasama dengan luas pemanfaatan mencapai 25.480,98 ha. Selain itu terdapat PBPH (persetujuan berusaha pemanfaatan hutan) oleh 2 PBPH dengan luas 11.663 ha.
- f. Sasaran terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.
 - 1. Indikator persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna) merupakan sebuah rezim yang mengatur permasalahan perdagangan tumbuhan satwa liar, dan merupakan isu yang terkait dengan Hubungan Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan pembangunan berkelanjutan makanya perlu usaha untuk penyelamatan satwa liar tersebut agar tidak punah.

Capaian yang diperoleh dari tahun 2021 hingga 2023 antara lain tahun 2021 mencapai 14,49%, tahun 2022 mencapai 27,08 % dan tahun 2023 mencapai 15,97%.
- g. Sasaran meningkatnya akses Kelola hutan oleh kelompok tani mandiri
 - 1. Indikator persentase kelompok tani mandiri

Kelompok tani mandiri sebagai kumpulan petani yang secara kolektif mengelola sumber daya dan usaha kehutanan dengan tujuan mencapai kemandirian ekonomi dan keberlanjutan. Dalam meningkatkan skala



usaha yang komersial, maka kerjasama petani dalam kelompok dapat ditingkatkan melalui pengembangan kelompok tani hutan menuju KTH mandiri dengan kelas kemampuan utama.

Capaian indikator kelompok tani mandiri tahun 2024 triwulan II mencapai 1,106% dengan rincian Kelompok Wanita Tani Hutan Simbang Sejahtera di Kab. Maros telah dilaksanakan penilaian dengan hasil naik dari Kelas Madya menjadi KTH Kelas Mandiri.

Adapun pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023, sampai dengan Triwulan II tersaji pada tabel berikut :



Tabel 1 (TC-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %		66,67 %	43%	64,50	83,33 %	43%	43,00
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH	100 %		60 %	0%	0,00	80 %	0%	0,00
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	5 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan	100 %		100 %	0%	0,00	-	0%	0,00
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	0 Dokumen	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	17697.36 TonCO2eq		15257.36 TonCO2eq	0 TonCO2eq	0,00	16435.36 TonCO2e	0 TonCO2eq	0,00
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH	24 kabupaten/kota		24 kabupaten/kota	0 kabupaten/kota	0,00	24 kabupaten/kota	0 kabupaten/kota	0,00
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	9 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		1.200 Dokumen	676 Dokumen	56,33	1.300 Dokumen	676 Dokumen	56,33



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang direhabilitasi	5 Lokasi		1 Lokasi	0 Lokasi	0,00	2 Lokasi	0 Lokasi	0,00
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	5 Kegiatan		1 Lokasi	0 Lokasi	0,00	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)	100 %		88,24 %	44%	49,86	94,11 %	44%	44,00
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	425 Jenis		375 Jenis	165 Jenis	44,00	400 Jenis	165 Jenis	38,82
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	3 Dokumen		-	-	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 Ha		27 Ha	13 Ha	48,15	27 Ha	13 Ha	48,15
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	112 Ha		-	-	0,00	15 Ha	0 Ha	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah yang dikelola	98,67 %		98,65 %	38%	0,39	98,66 %	38%	0,39
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3	2.400.000 Ton		2.200.000 Ton	8886,94 Ton	0,40	2.300.000 Ton	8886,4 ton	0,37
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9 Dokumen		3 Dokumen	1 dokumen	33,33	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	750 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	0 Dokumen	0,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan pemarkaksa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	41,17 %		40 %	15,90%	0,40	40,63 %	15,90%	0,39
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 Usaha/Kegiatan		60 Usaha/Kegiatan	51 Usaha/Kegiatan	85,00	65 Usaha/Kegiatan	51 Usaha/Kegiatan	72,86
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	30 Dokumen		10 Dokumen	5 Dokumen	50,00	3 Dokumen	5 Dokumen	16,67
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	170 Badan Usaha		150 Badan Usaha	51 Badan Usaha	34,00	15 Badan Usaha	51 Badan Usaha	30,00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %		33,33 %	4,44%	13,32	66,67 %	4,44%	4,44
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan	15 Masyarakat Hukum Adat		5 Masyarakat Hukum Adat	0 Masyarakat Hukum Adat	0,00	10 Masyarakat Hukum Adat	0 Masyarakat Hukum Adat	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	15 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	40,00	3 Dokumen	2 Dokumen	13,33
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	100 %		73,4 %	41,66%	56,76	86,7 %	41,66%	41,66
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	1.504 Lembaga		1.104 Lembaga	12 Lembaga	1,09	1.304 Lembaga	12 Lembaga	0,80
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	24 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	50,00	24 Dokumen	12 Dokumen	50,00
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1.000 Orang		-	-	0,00	100 Orang	0 Orang	0,00
2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	480 Keluarga		-	-	0,00	120 Keluarga	0 Keluarga	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	100 %		88,23 %	4,60%	5,21	94,11 %	4,60%	4,60
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	170 Penghargaan		150 Penghargaan	14 Penghargaan	9,33	160 Penghargaan	14 Penghargaan	8,24
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	170 Entitas		150 Entitas	53 Entitas	35,33	25 Entitas	53 Entitas	31,18



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	50%		100%		
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjuti kasus/ perkara LH yang ditangani	96 Rekomendasi		30 Rekomendasi	14 Rekomendasi	46,67	32 Rekomendasi	14 Rekomendasi	14,58
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	48 Perkara		15 Perkara	9 Perkara	60,00	3 Perkara	9 Perkara	18,75
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	48 Pengaduan		15 Pengaduan	6 Pengaduan	40,00	3 Pengaduan	6 Pengaduan	12,50
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	58 %		55 %	50,41%	91,65	57 %	50,41%	86,91
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional	50 %		30 %	0%	0,00	40 %	0%	0,00
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	4 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1 Unit		-	-	0,00	0	0 Unit	0,00
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	95 %		95 %	100%	105,26	95 %	100%	105,26
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	95 %		95 %	43%	53,65	95 %	43%	45,26
		Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	95 %		95 %	76%	80,00	95 %	76%	80,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75 Dokumen		25 Dokumen	13 Dokumen	52,00	25 Dokumen	13 Dokumen	17,33
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan		15 Laporan	9 Laporan	60,00	16 Laporan	9 Laporan	19,15
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	50,00	4 Laporan	2 Laporan	16,67
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Laporan		15 Laporan	7 Laporan	46,67	15 Laporan	7 Laporan	1,53
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	897 Orang/ Bulan		897 Orang/ Bulan	1688 orang/bulan	188,18	897 Orang/ Bulan	1688 orang/bulan	188,18
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen		-	-	0,00	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	50,00	24 Dokumen	12 Dokumen	16,67



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	100,00	1 Dokumen	1 dokumen	33,33
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50,00	14 Laporan	6 Laporan	14,29
3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen		-	-	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah	18 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	33,33	6 Laporan	2 Laporan	11,11
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	4 Dokumen	2 Dokumen	16,67
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26 Dokumen		6 Dokumen	0 Dokumen	0,00	10 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan		-	-	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	2 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	2 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	4 Laporan	0 Laporan	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	4.827.090.000 Rp		1.609.030.000 Rp	Rp0	0,00	1.609.030.000 Rp	Rp0	0,00
3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen		-	-	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Laporan		-	-	0,00	12 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19 Laporan		5 Laporan	0 Laporan	0,00	7 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	2 Unit	0 Unit	0,00
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.596 Paket		-	-	0,00	798 Paket	-	0,00
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		-	-	0,00	1 Dokumen	-	0,00
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		-	-	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	170 Orang		-	-	0,00	50 Orang	0 Orang	0,00
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	410 Orang		-	-	0,00	100 Orang	0 Orang	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21 Laporan		7 Laporan	0 Laporan	0,00	7 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	2 Paket	0 Paket	0,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	3 Paket	0 Paket	0,00
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		3 Paket	1 Paket	33,33	3 Paket	1 Paket	11,11



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	5 Paket	0 Paket	0,00
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	12 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370 Laporan		180 Laporan	45 Laporan	25,00	90 Laporan	45 Laporan	12,16
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	51 Unit		6 Unit	1 Unit	16,67	20 Unit	1 Unit	1,96
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	0 Unit	0,00
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	1 Paket	50,00	2 Paket	1 Paket	16,67
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		-	-	0,00	5 Unit	-	0,00
3.28.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit		-	-	0,00	1 Unit	-	0,00
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		-	-	0,00	2 Unit	0 Unit	0,00
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		-	-	0,00	2 Unit	0 Unit	0,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	50,00	4 Laporan	2 Laporan	16,67
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	4 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50,00	12 Laporan	6 Laporan	16,67
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		-	-	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50,00	12 Laporan	6 Laporan	16,67
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	22 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	33,33	8 Laporan	2 Laporan	9,09
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit		31 Unit	5 Unit	16,13	35 Unit	5 Unit	16,13
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	499 Unit		165 Unit	43 Unit	26,06	499 Unit	43 Unit	8,62
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		-	-	0,00	5 Unit	0	0,00
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit		30 Unit	0 Unit	0,00	30 Unit	0 Unit	0,00
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		1 Unit	0 unit	0,00	4 Unit	0 unit	0,00
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit		8 Unit	0 unit	0,00	4 Unit	0 unit	0,00
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		10 Unit	0 unit	0,00	4 Unit	0 unit	0,00
3.28.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	40 Ha		-	-	0,00	20 Ha	0 ha	0,00
2.11.3.28.0.00.57.00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan pengelolaan Limbah B3 UPTD PLB3			1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	35,23 %		21 %	9,70%	46,19	35,23 %	9,70%	27,53



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	12,02 %		11,91 %	9,00%	75,57	11,97 %	9,00%	74,88
		Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	0,03 %		0,03 %	0,06%	200,00	0,03 %	0,06%	200,00
		Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	3,74 %		3,57 %	0,94%	26,33	3,63 %	0,94%	25,13
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran	0,01 %		0,01%	0,00	0,00	0,01 %	0,00	0,00
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	6 Unit		0 Unit	0 unit	0,00	2 Unit	0 unit	0,00
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan	100 %		100 %	0%	0,00	100 %	0,00	0,00
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	72 Dokumen		24 Dokumen	0 Dokumen	0,00	24 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	129.000 M3		43.000 M3	0 m3	0,00	43.000 M3	0 m3	0,00
		Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	12.000 Ton		4.000 Ton	0 ton	0,00	4.000 Ton	0 ton	0,00
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	30 Dokumen		10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	10 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	30 Dokumen		10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	10 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman	745 Ha		167 Ha	0 Ha	0,00	241 Ha	0 Ha	0,00
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	461 Ha		76 Ha	0 Ha	0,00	150 Ha	0 Ha	0,00
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	230 Ha		200 Ha	0 Ha	0,00	10 Ha	0 Ha	0,00
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	37 Unit		6 Unit	0 Unit	0,00		0 Unit	0,00
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	109 Ha		50 Ha	0 Ha	0,00	35 Ha	0 Ha	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan	1.780.029 Ha		1.780.029 Ha	624104.66 Ha	35,06	1.780.029 Ha	624104.66 Ha	35,06
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 Ha		1.780.029 Ha	771141.90 Ha	43,32	1.780.029 Ha	771141.90 Ha	43,32
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi		2 Operasi	0 Oeprasi	0,00	2 Operasi	0 Oeprasi	0,00
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	72 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	0,00	24 Laporan	12 Laporan	0,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Perizinan IUIPHHBK	3.900 Ton		1.300 Ton			1.300 Ton		
3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	3 Unit Managemen		1 Unit Managemen			1 Unit Managemen		
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 Unit Managemen		1 Unit Managemen			1 Unit Managemen		
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	120.000 M3		40.000 M3	1102,48 m3	2,76	40.000 M3	1102,48 m3	0,92
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit Managemen		-	-	0,00	1 Unit Managemen	-	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	12 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	4 Laporan	0 Dokumen	0,00
3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	3 Unit Managemen		1 Unit Managemen	0 Unit Managemen	0,00		0 Unit Managemen	0,00
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Benih/ Bibit yang Tersertifikasi	70 %		70 %	35%	50,00	70 %	35%	50,00
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengerdar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengerdar Benih, Pengadaan dan Pengerdar Bibit, Serta Pengadaan dan Pengerdar Benih dan Bibit Dalam Provinsi	13 Unit Usaha		3 Unit Usaha	3 unit usaha	100,00	5 Unit Usaha	3 unit usaha	23,08
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	17 Sertifikat		3 Sertifikat	1 Sertifikat	33,33	7 Sertifikat	1 Sertifikat	5,88
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	6 Sertifikat		-	-	0,00	3 Sertifikat	-	0,00
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	17 Sertifikat		3 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	7 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	36 Laporan		12 Laporan	0 Sertifikat	0,00	12 Laporan	0 Sertifikat	0,00
3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	4 Ha		2 Ha	1 ha	50,00	1 Ha	1 ha	25,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk	3 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata								
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES	3 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	3 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	2,81 %		1,75 %	0,11%	6,29	2,6 %	0,11%	3,91
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya	72 Kelompok		24 Kelompok	0 Kelompok	0,00	24 Kelompok	0 Kelompok	0,00
		Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi	48 Kelompok		4 Kelompok	0 Kelompok	0,00	20 Kelompok	0 Kelompok	0,00
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	243 Orang		243 Orang	100 Orang	41,15	243 Orang	100 Orang	41,15
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	135 Kelompok		33 Kelompok	0 kelompok	0,00	53 Kelompok	0 kelompok	0,00
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	6.000 Ha		2.000 Ha	9950,98 ha	497,55	2.000 Ha	9950,98 ha	165,85
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif	29,17 %		20,83 %	0%	0,00	25 %	0%	0,00
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam	Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota	29 %		21 %	0%	0,00	25 %	0%	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	12 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3 Lembaga		1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00



Berdasarkan evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 Triwulan II, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan

Program pengelolaan hutan mendukung sasaran menurunnya emisi GRK sektor kehutanan, terpeliharanya fungsi hutan dan meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan. Adapun indikator program pengelolaan hutan sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu
- b. Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi
- c. Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan
- d. Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi di luar kawasan hutan negara

Pencapaian indikator Program Pengelolaan Hutan diuraikan sebagai berikut:

- a. Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu

Capaian produksi hasil hutan kayu tahun 2024 Triwulan II mencapai 3.347,4925 m³. Produksi hasil hutan kayu bersumber dari kayu gergajian dan veneer pada 4 (empat) kabupaten. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan pada tahun 2023 sebesar 77.201,57 m³ mengalami penurunan produksi dari tahun 2022 sebesar 111.444,19 m³ yang disebabkan hutan kayu olahan dipengaruhi stok kayu rakyat siap tebang yang minim dan kayu masuk dari luar provinsi Sulawesi Selatan juga minim, selain itu juga dipengaruhi tersedianya alternatif pengganti kayu untuk bahan bangunan. Produksi hasil hutan kayu olahan berasal dari kelompok komoditi kayu gergajian, kayu lapis dan veneer, dengan nilai produksi terbesar berasal dari kayu gergajian.

Capaian produksi hasil hutan bukan kayu tahun 2024 triwulan II mencapai 346,043 ton. Produksi hasil hutan bukan kayu bersumber dari getah pinus dan rotan. Capaian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun 2023 sebesar 7.240,39 ton dan tahun 2022 sebesar 8.102,81 ton yang diperoleh dari produksi kelompok rotan, kelompok getah dan kelompok resin. Produksi tahun 2023 mengalami penurunan produksi dari tahun 2022 yang dipengaruhi didukung dengan adanya penurunan jumlah izin pemungutan HHBK yang berdampak langsung dengan jumlah produksi pemungutan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka Pemanfaatan Hutan



di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung jumlah penerimaan dari sektor kehutanan pada tahun 2023 mencapai Rp. 1.612.586.905-.

- b. Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi
Akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi melalui PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) kepada pelaku usaha dan perhutanan sosial kepada kelompok masyarakat.

Capaian akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi tahun 2024 triwulan II mencapai 37.143,98 ha kepada pelaku usaha dan 217.174,83 ha kepada kelompok masyarakat. Sehingga total akses pelaku usaha dan kelompok masyarakat mencapai 254.318,81 ha.

- c. Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan

Kerusakan hutan di Sulawesi Selatan disebabkan oleh kebakaran hutan dan perambahan hutan. kerusakan hutan akan mempengaruhi fungsi dan kawasan hutan baik secara fisik maupun kimia tanah sehingga berdampak pada produktifitas hutan. Kerusakan kawasan hutan tahun 2023 mencapai 919,10 ha atau naik sebesar 58.24 % dari tahun 2022 seluas 580,24 ha. kerusakan hutan terbesar tahun 2023 yaitu kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 910,70 yang naik sebesar 1.530,62 % dari luas 55,85 ha pada tahun 2022. sedangkan perambahan hutan/illegal logging mencapai 8,4 ha atau turun 98,22 % dari luas 471,94 ha pada tahun 2022.

- d. Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi di luar kawasan hutan negara

Lahan kritis merupakan suatu kondisi lahan yang sudah mengalami degradasi, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di Sulawesi Selatan luas lahan kritis pada tahun 2023 masih terdapat ± 384.670,80 ha dengan tingkat kekritisannya sangat kritis dan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Untuk memulihkan kondisi lahan kritis tersebut diperlukan rehabilitasi melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman secara kontinyu. Kondisi itu memerlukan kolaborasi berbagai pihak, tidak cukup peran pemerintah untuk merehabilitasi namun peran swasta dan masyarakat juga diperlukan. Jika melihat peran pemerintah pada UU No. 23 tahun 2014, maka peran/kewenangan rehabilitasi terbagi atas rehabilitasi di dalam dan diluar kawasan hutan. Kewenangan provinsi sebagaimana di atur pada Undang Undang tersebut, pelaksanaan rehabilitasi lahan berada di luar kawasan hutan negara, yang sangat ditentukan



partisipatif masyarakat karena sasaran lokasi berada pada tanah milik masyarakat yang bersifat privat, sehingga diperlukan singgung dan dukungan masyarakat dan pemerintah.

Luas rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2023 mencapai 4.756 ha terdiri atas 4.670 ha di dalam kawasan hutan dan 86 ha di luar kawasan hutan. Capaian realisasi rehabilitasi hutan dan lahan tahun sampai dengan 2023 mencapai 73,27 % dari luas lahan kritis 384.670,80 ha atau mengalami pertumbuhan rehabilitasi sebesar 1,71 % dari tahun 2022.

Terkait rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan tahun 2023 yang menjadi kewenangan provinsi, realisasi penanaman seluas 86 ha berupa penanaman hutan rakyat dan penanaman MPTS, atau menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai 112 ha.

2. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya :

Adapun indikator Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya adalah Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITIES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata. Capaian tahun 2024 triwulan II masih nihil

3. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan melalui kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan. Indikator program Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yaitu Persentase Peningkatan Kemampuan (Kelola Kelembagaan, Kelola Usaha, Kelola Kawasan KTH). Capaian hingga triwulan II tahun 2024 mencapai 0,11 %

4. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pelibatan forum DAS mendorong penyusunan rencana pengelolaan DAS. Forum DAS pada tingkat kabupaten telah terbentuk sebanyak 4 forum DAS, 2 forum DAS (kabupaten Bulukumba dan Gowa) telah ditetapkan melalui keputusan gubernur sedangkan 2 forum DAS (kabupaten Makassar dan Soppeng) masih keputusan bupati/walikota.



5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan menyelaraskan kebijakan lingkungan hidup yang ada dengan rencana pembangunan dan pengelolaan lingkungan di tingkat provinsi sekaligus membantu dalam memastikan bahwa kebijakan dan rencana aksi sesuai dengan tujuan-tujuan perlindungan lingkungan. Capaian program tahun 2023 berupa dokumen perencanaan lingkungan hidup dimaksud adalah dokumen KLHS penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 2024 dilakukan penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait RPPLH, pada tahun 2023 dilakukan verifikasi di KLHK terhadap Draft Dokumen RPPLH yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Surat Edaran MenLHK No. 5 Tahun 2016, dan pada tahun 2024 RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 2024.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan, termasuk udara, air, dan tanah, sehingga memastikan bahwa lingkungan tersebut dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Indikator program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yaitu Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah dengan target sebesar 5,40 %. Capaian program ini tahun 2023 sebesar 0,37 % dari target 5,40 %.

7. Program pengelolaan keanekaragaman hayati

Program pengelolaan keanekaragaman hayati tahun 2023 difokuskan pada pengelolaan kebun raya Pucak yang dikelola provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati berupa penangkaran jenis tumbuhan yang endemic Sulawesi Selatan yang berjumlah 100 jenis, pada area kebun raya seluas 120 ha. Indikator program pengelolaan keanekaragaman hayati yaitu Persentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi) dengan target 100 %. Capaian program ini mencapai 100 %. Dengan demikian program ini mencapai target pada tahun 2023.



8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3 bertujuan mengurangi volume limbah B3 yang dihasilkan dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Indikator program ini yaitu Cakupan limbah yang dikelola dengan target 98 %. Adapun capaian program mencapai 75 % atau 76,53 % dari target.

9. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH bertujuan untuk evaluasi terhadap tingkat kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diberikan kepada mereka. Indikator program ini yaitu Rasio tingkat ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH dengan capaian realisasi 26 % dari target 26 % atau terealisasi 100 %. Faktor pendorong program ini yaitu inspeksi/pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa pemegang izin mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan mereka.

10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak (MHA) yang terkait dengan PPLH

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak (MHA) yang terkait dengan PPLH bertujuan melindungi, melestarikan, dan mengakui kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Indikator program ini adalah Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan realisasi 100 %.

Program Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di 24 Kab/Kota, serta memberikan Pendampingan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat Adat di Provinsi Sulsel. Pembinaan Penerapan MHA dan Kearifan Lokal yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan, menghasilkan keluaran terdatanya beberapa Kabupaten yang telah menetapkan aturan yang mengatur tentang pengakuan keberadaan Masyarakat hukum Adat dan Kearifan



Lokal yang ada di wilayahnya, yaitu Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang.

11. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program lingkungan hidup. Indikator program yaitu Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH dengan capaian 100 % dari target 100 %. Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH sebanyak 154 lembaga.

12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat bertujuan untuk membentuk budaya di mana kepedulian terhadap lingkungan menjadi nilai yang dihargai dan diterapkan oleh masyarakat secara luas. Indikator program ini yaitu Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan dengan realisasi 138 penghargaan dari target 138 penghargaan. Dengan demikian program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mencapai target atau realisasi 100 %.

13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang dilaporkan. Indikator program ini Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan realisasi 100 % dari target 100 %. Dengan demikian program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup mencapai target atau realisasi 100 %.

14. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh limbah. Indikator program ini yaitu Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani dengan capaian realisasi sebesar 81,15 % atau 109,66 % dari target 74 %. Faktor pendukung program pengelolaan persampahan yaitu pelaksanaan upaya penanganan dan pengurangan sampah tertangani di setiap kab/kota mulai dari hulu ke hilir. Faktor penghambat pengelolaan persampahan yaitu tidak terpilahnya sampah organik, plastik, bahan kimia pada tingkat rumah tangga, sehingga sampah yang



tidak terpilah menyulitkan proses daur ulang karena membutuhkan pemisahan kembali yang memakan waktu dan biaya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :



Tabel 2 (TC_30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Urusan Kehutanan											
1	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		%	15,65	16,25	16,76	27	26,80	30,67	16,76	27	
2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		%	17,59	16,20	14,82	0,02	0,03	0,05	14,82	0,029	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi		%	57,91	61,60	65,47	72,00	71,14	73,27	65,47	72,00	
4	Kontribusi kehutanan terhadap PDRB		%	0,06	0,07	0,08	0,05	0,05	0,05	0,08	0,05	
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan		%	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	
	Urusan Lingkungan Hidup											
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	72,25	72,63	72,84	73,57	74,17	74,30	72,84	73,57	
2	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		%			73,84	60	61,97		73,84	60	



Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome sesuai tabel di atas diuraikan sebagai berikut :

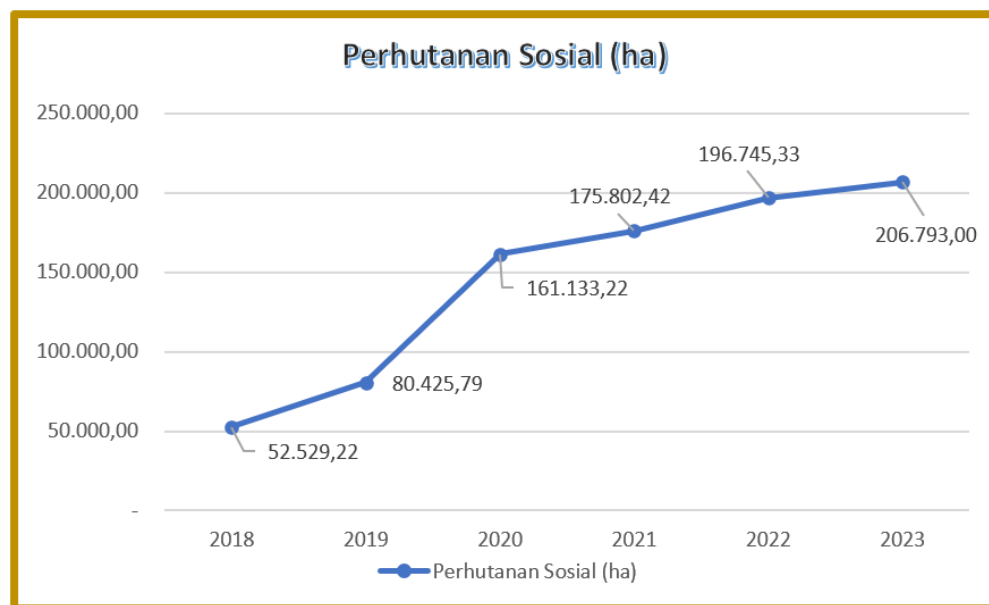
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

Perhutanan sosial menjadi suatu solusi dan tantangan pembangunan sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. Perhutanan sosial menjadi solusi karena masyarakat dan lembaga desa diberi akses legal pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan akses legal tersebut masyarakat dapat mengelola kawasan hutan dengan mempertimbangkan potensi hutan tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomian mikro bagi masyarakat.

Pencapaian pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sampai dengan tahun 2023 mencapai 206.793 ha atau 11,62 % dari luas hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha.

Perkembangan perhutanan sosial dapat dilihat pada diagram berikut :

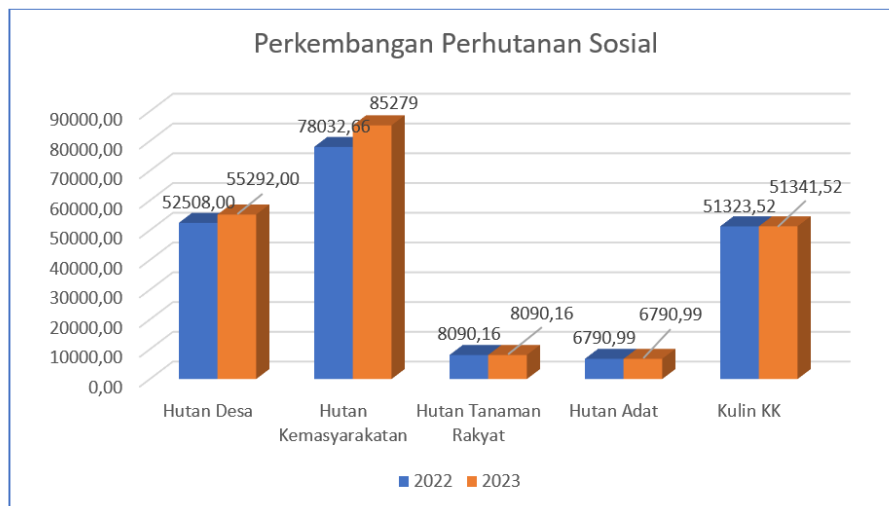
Grafik 4
Perkembangan perhutanan sosial 2023



Akses legal pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan Kulin KK sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

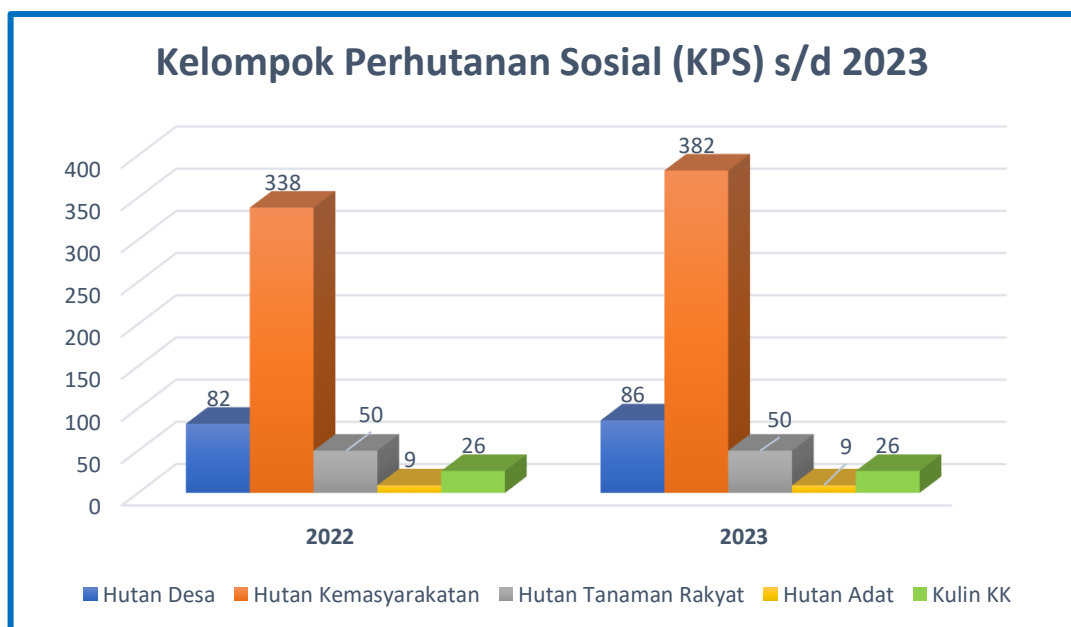


Grafik 5
Perkembangan skema Perhutanan Sosial



Adapun peningkatan akses kelompok tani hutan yang melakukan pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sebagai berikut jumlah kelompok 553 kelompok tani atau 30,67 % dari total usulan KTH yang terintegrasi sebanyak 1.803 kelompok.

Grafik 6
Kelompok Perhutanan Sosial 2023



Perkembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini memberi gambaran bahwa animo masyarakat untuk mengelola hutan semakin besar yang tentunya diperlukan pembinaan dan pengendalian, serta peningkatan usaha masyarakat sehingga



dapat memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tenurial lahan hutan yang selama ini menjadi persoalan pembangunan kehutanan.

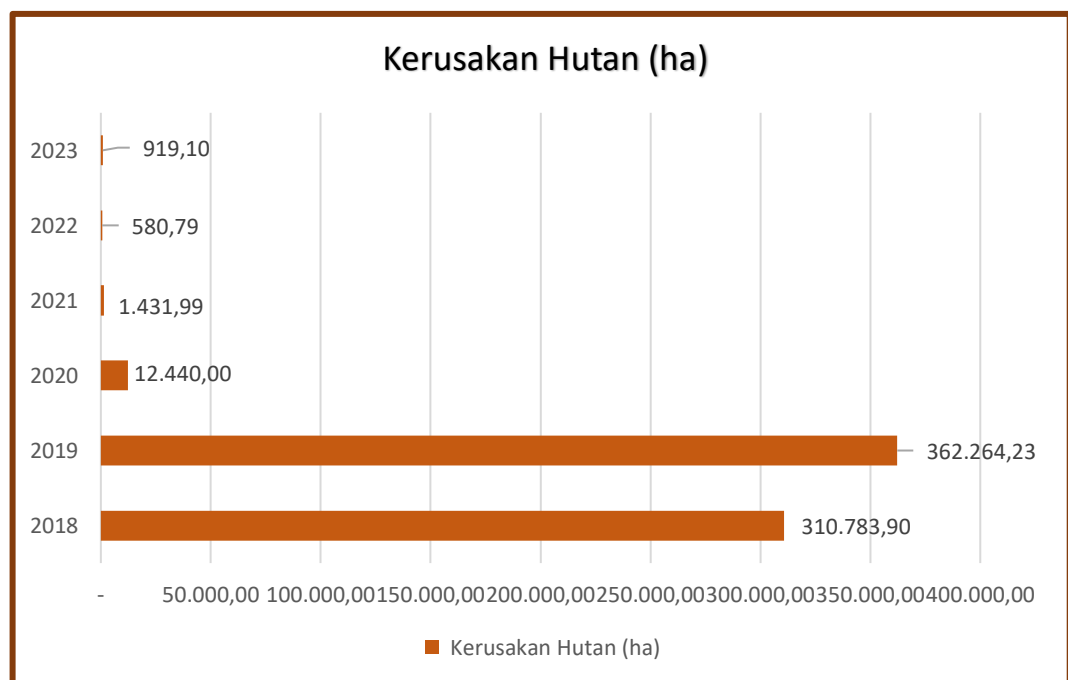
Berdasarkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII, dengan target perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 272.858,95 Ha, maka persentase capaian luasan perhutanan sosial sebesar 79,59 % dari target yang ditetapkan.

2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi).

Kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan. Aktivitas masyarakat sekitar hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan hutan, sebagian besar masyarakat memanfaatkan hutan sebagai lahan budidaya tanaman semusim yang memiliki masa panen singkat. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan hutan terus dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga diharapkan adanya kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan yang ada.

Kejadian kerusakan hutan disebabkan pengolahan hutan tanpa izin (perambahan hutan), kebakaran hutan dan illegal logging. Perkembangan kerusakan hutan disajikan pada diagram berikut :

Grafik 7
Kerusakan Kawasan Hutan



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa, kerusakan hutan mengalami penurunan menjadi 919,10 ha dai tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena



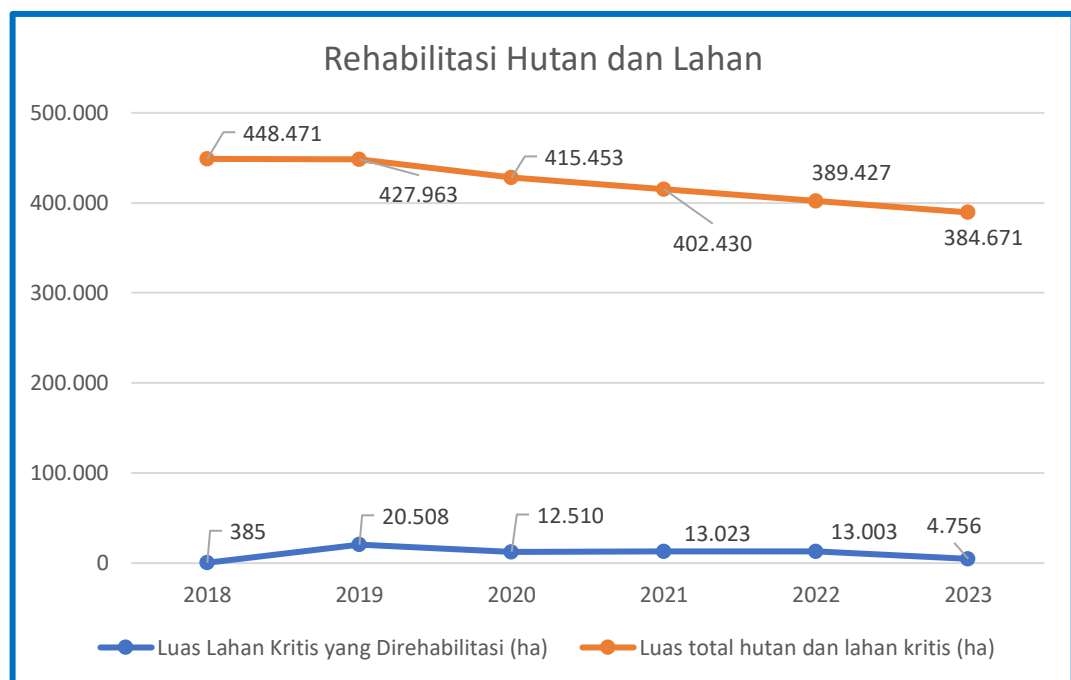
tahun 2019 luas lahan kritis masih menjadi bagian penghitungan kerusakan hutan, yang semestinya menjadi bagian penghitungan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

Lahan kritis menjadi prioritas pembangunan kehutanan, dengan luas lahan kritis mencapai 384.670,8 ha pada tahun 2023. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan tahun 2023 seluas 281.824,97 ha atau 73,27 % dari luas lahan kritis. Salah satu strategi penanganan lahan kritis melalui pelibatan semua stakeholder untuk melakukan penanaman. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan disajikan sebagai berikut :

Grafik 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan



4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,06 %, tahun 2019 tetap 0,06 %, pada tahun 2020 sebesar 0,06 dan tahun 2022 sebesar 0,05 %, tahun 2023 sebesar 0,05 %. Secara persentase menunjukkan kecilnya kontribusi sektor

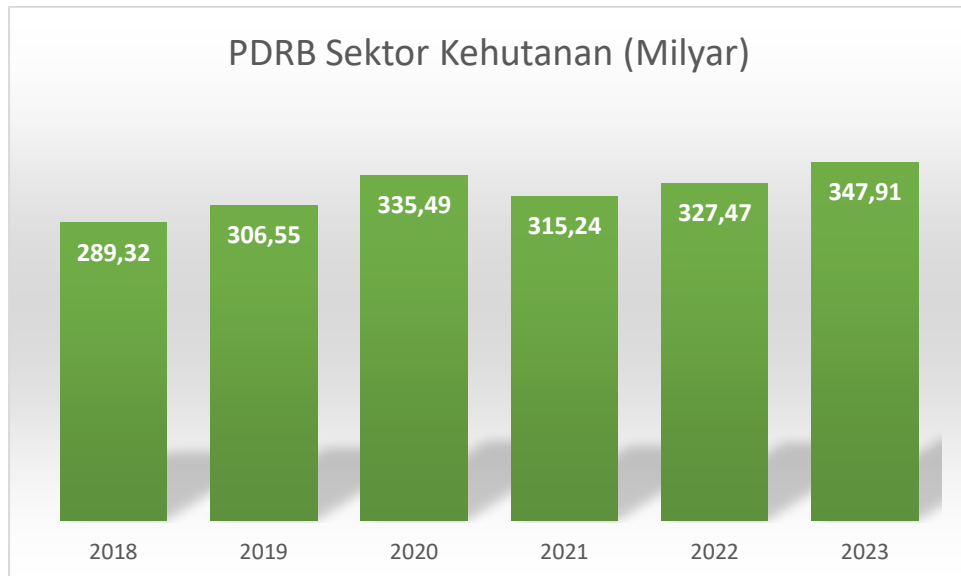


kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun secara nilai terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ ekowisata.

Grafik 9

Kontribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB Sulsel



5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan

Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,66 persen pada tahun 2023.

Tabel 3

Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan Lindung	1.974.929	1.974.929	1.974.929	1.974.929	1.974.929
Total Luas Kawasan Hutan	2.610.060	2.610.060	2.610.060	2.610.060	2.610.060
Rasio	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67

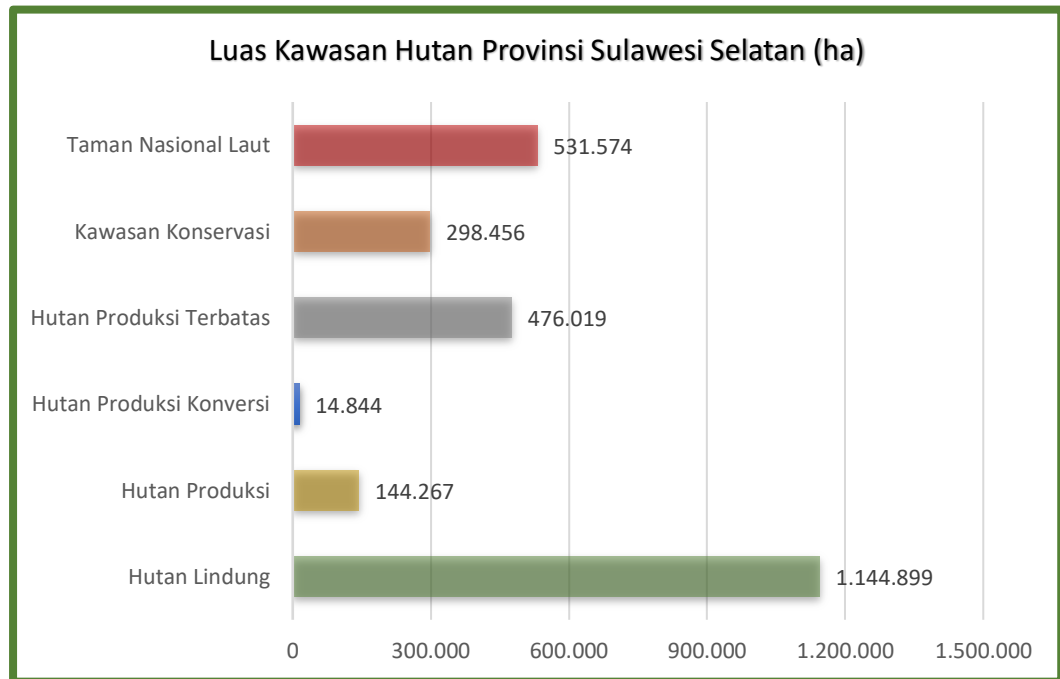
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tahun 2020 mencapai 75,67 %, merupakan luas rasio luas kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan



Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 bahwa luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 ha, tersaji pada diagram berikut :

Grafik 10

Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan

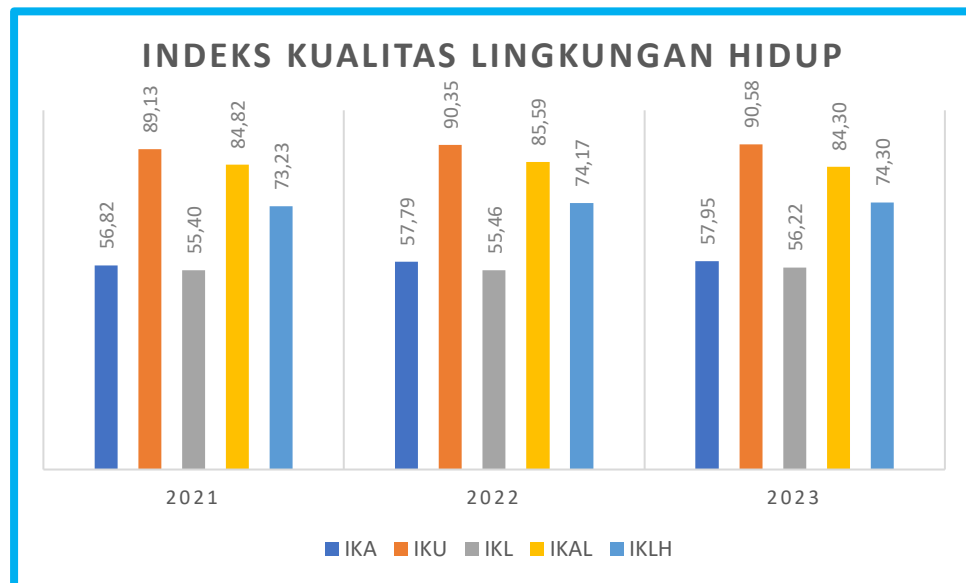


6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan.

Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik 11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung diperuntukkan untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan akan memberi dampak pada ekonomi daerah namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Potensi kawasan hutan cukup beragam mulai pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan/ekowisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan dukungan berbagai pihak.

2. Adanya kerusakan wilayah DAS

Di provinsi Sulawesi Selatan terdapat DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten, dan DAS dalam Kabupaten. Kondisinya terdapat DAS yang perlu dipertahankan dan DAS yang perlu dipulihkan. Salah satu DAS lintas provinsi yang memerlukan pemulihan yaitu DAS Saddang dan salah satu DAS lintas kabupaten yang perlu dipulihkan yaitu DAS Jeneberang seluas 78.883,90 ha.

3. Masih adanya kasus illegal logging, kebakaran hutan, perladangan berpindah



4. Masih rendahnya daya saing (kualitas dan kuantitas) produk kehutanan yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan
5. Penanganan sampah dan perbaikan kualitas udara perkotaan
6. Peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik serta proses industri bersih dan ramah lingkungan
7. Pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali,

Permasalahan yang masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup antara lain:

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
5. Pencemaran lingkungan dengan meningkatnya beban pencemaran pada Daerah Aliran Sungai dan emisi ke udara ambient
6. Penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. Maka kebutuhan rencana kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4 (TC-31)

Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				6.108.756.245	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				6.108.756.245
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				6.108.756.245	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				6.108.756.245
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup		66,67%	375.996.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup		66,67%	375.996.000
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH		60%	37.456.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH		60%	37.456.000
2.11.02.1.01.00 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Sulawesi Selatan	3 Dokumen	37.456.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Sulawesi Selatan	3 Dokumen	37.456.000
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan		100 %	338.540.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan		100 %	338.540.000
2.11.02.1.02.00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	338.540.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	338.540.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi emisi GRK dari sektor limbah		15257.36 TonCO ₂ eq	1.112.600.110	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi emisi GRK dari sektor limbah		15257.36 TonCO ₂ eq	1.112.600.110
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH		24 kabupaten/ kota	1.112.600.110	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH		24 kabupaten/ kota	1.112.600.110
2.11.03.1.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Makassar	3 Dokumen	39.046.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Makassar	3 Dokumen	39.046.200
2.11.03.1.01.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Makassar	3 Dokumen	15.680.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Makassar	3 Dokumen	15.680.000
2.11.03.1.01.00 15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Makassar	1000 Dokumen	1.057.873.910	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Makassar	1000 Dokumen	1.057.873.910



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KeHaTi)		88,24%	25.047.600	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KeHaTi)		88,24%	25.047.600
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keaneekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola		375 Jenis	25.047.600	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keaneekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola		375 Jenis	25.047.600
2.11.04.1.01.00 03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Maros	27 ha	25.047.600	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Maros	27 ha	25.047.600
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah yang dikelola			20.611.100	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah yang dikelola			20.611.100
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3		2.200.000 Ton	20.611.100	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3		2.200.000 Ton	20.611.100
2.11.05.1.01.00 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar	3 Dokumen	20.611.100	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar	3 Dokumen	20.611.100
2.11.05.1.01.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Makassar, Sulawesi Selatan	250 Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Makassar, Sulawesi Selatan	250 Dokumen	-
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan pamarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH		40%	22.607.200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan pamarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH		40%	22.607.200
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		60 Usaha/ Kegiatan	22.607.200	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		60 Usaha/ Kegiatan	22.607.200



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.06.1.01.00 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Makassar	10 Dokumen	12.632.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Makassar	10 Dokumen	12.632.000
2.11.06.1.01.00 06	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Makassar	150 Badan Usaha	9.975.200	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Makassar	150 Badan Usaha	9.975.200
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		33,33 %	795.700	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		33,33 %	795.700
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan		5 Masyarakat Hukum Adat	795.700	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan		5 Masyarakat Hukum Adat	795.700
2.11.07.1.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Makassar	3 Dokumen	795.700	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Makassar	3 Dokumen	795.700
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH		73,4 %	19.230.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH		73,4 %	19.230.000
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH		1104 lembaga	19.230.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH		1104 lembaga	19.230.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.08.1.01.00 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Makassar	14 Dokumen	19.230.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Makassar	14 Dokumen	19.230.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup		88,23 %	15.045.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup		88,23 %	15.045.000
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		150 penghargaan	15.045.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		150 penghargaan	15.045.000
2.11.09.1.01.00 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Makassar	150 Entitas	15.045.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Makassar	150 Entitas	15.045.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100%	11.970.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100%	11.970.000
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjuti kasus/ perkara LH yang ditangani		30 Rekomendasi	11.970.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjuti kasus/ perkara LH yang ditangani		30 Rekomendasi	11.970.000
2.11.10.1.01.00 03	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Makassae	15 Perkara	5.230.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Makassae	15 Perkara	5.230.000
2.11.10.1.01.00 07	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Makassae	15 Pengaduan	6.740.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Makassae	15 Pengaduan	6.740.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani		55%	19.244.800	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani		55%	19.244.800
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional		30%	19.244.800	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional		30%	19.244.800



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.11.1.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Makassar	3 Dokumen	19.244.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Makassar	3 Dokumen	19.244.800
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				149.307.142.240	Urusan Pemerintahan Pilihan				149.307.142.240
03.28	Urusan Pemerintaha Bidang Kehutanan				149.307.142.240	Urusan Pemerintaha Bidang Kehutanan				149.307.142.240
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah		95 %	145.876.948.222	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah		95 %	145.876.948.222
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		95 %			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		95 %	
		Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti		95 %			Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti		95 %	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25 Dokumen	402.618.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25 Dokumen	402.618.800
3.28.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	2 Dokumen	211.313.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	2 Dokumen	211.313.100
3.28.01.1.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	96.820.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	96.820.200
3.28.01.1.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	12.760.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	12.760.000
3.28.01.1.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	14.825.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	14.825.500
3.28.01.1.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	9.825.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	9.825.000
3.28.01.1.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	15 Laporan	7.207.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	15 Laporan	7.207.000
3.28.01.1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	4 Laporan	49.868.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	4 Laporan	49.868.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15 Laporan	128.324.724.487,88	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15 Laporan	128.324.724.487,88
3.28.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	897 Orang/Bulan	128.138.177.787,88	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	897 Orang/Bulan	128.138.177.787,88
3.28.01.1.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	24 Dokumen	52.100.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	24 Dokumen	52.100.000
3.28.01.1.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	1 Laporan	-
3.28.01.1.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Makassar	1 Dokumen	60.330.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Makassar	1 Dokumen	60.330.000
3.28.01.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Makassar	12 Laporan	74.116.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Makassar	12 Laporan	74.116.700
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah		6 Laporan	34.357.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah		6 Laporan	34.357.400
3.28.01.1.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	4 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	4 Dokumen	-
3.28.01.1.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	6 Dokumen	30.970.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	6 Dokumen	30.970.000
3.28.01.1.03.00 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	2 Laporan	2.750.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	2 Laporan	2.750.000
3.28.01.1.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	2 Laporan	427.200	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	2 Laporan	427.200
3.28.01.1.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	4 Laporan	210.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	4 Laporan	210.200
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5 Laporan	45.875.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5 Laporan	45.875.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.28.01.1.05.00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	2 Unit	15.370.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	2 Unit	15.370.000
3.28.01.1.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	1 Dokumen	30.505.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	1 Dokumen	30.505.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Laporan	3.192.572.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Laporan	3.192.572.500
3.28.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	1 Paket	1.210.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	1 Paket	1.210.500
3.28.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	1 Paket	2.363.108.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	1 Paket	2.363.108.000
3.28.01.1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo,	3 Paket	227.479.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo,	3 Paket	227.479.500



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Luwu Utara, Luwu Timur,					Luwu Utara, Luwu Timur,		
3.28.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	5 Paket	87.442.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	5 Paket	87.442.400
3.28.01.1.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	12 Laporan	22.716.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	12 Laporan	22.716.300
3.28.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	180 Laporan	488.688.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	180 Laporan	488.688.800
3.28.01.1.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	2 Dokumen	1.927.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	2 Dokumen	1.927.000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		6 Unit	340.727.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		6 Unit	340.727.000
3.28.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	2 Paket	340.727.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	2 Paket	340.727.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Laporan	12.235.737.632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Laporan	12.235.737.632
3.28.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	4 Laporan	330.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	4 Laporan	330.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.28.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	746.743.996	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	746.743.996
3.28.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	11.488.663.636	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	11.488.663.636
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara		6 Laporan	1.300.335.402	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara		6 Laporan	1.300.335.402
3.28.01.1.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar	31 Unit	297.340.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar	31 Unit	297.340.000
3.28.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	165 Unit	936.565.402	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	165 Unit	936.565.402
3.28.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar	30 Unit	9.630.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar	30 Unit	9.630.000
3.28.01.1.09.00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Makassar,	1 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Makassar,	1 Unit	-
3.28.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Soppeng	8 Unit	56.800.000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Soppeng	8 Unit	56.800.000
3.28.01.1.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar,	10 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar,	10 Unit	-
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu		21 %	3.370.554.418	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu		21 %	3.370.554.418
		Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi		11,91 %			Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi		11,91 %	
		Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan		0,03 %			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan		0,03 %	
		Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara		3,57 %			Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara		3,57 %	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran			518.603.500	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran			518.603.500
3.28.03.1.01.00 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Makassar,	1 Dokumen	518.603.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Makassar,	1 Dokumen	518.603.500
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan		100%	145.000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan		100%	145.000
3.28.03.1.02.00 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Makassar,	24 Dokumen	145.000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Makassar,	24 Dokumen	145.000
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		43.000 M3	300.000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		43.000 M3	300.000
		Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		4.000 Ton			Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		4.000 Ton	
3.28.03.1.03.00 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Makassar,	1 Dokumen	300.000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Makassar,	1 Dokumen	300.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman		167 ha	2.516.135.918	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman		167 ha	2.516.135.918
3.28.03.1.04.00 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Makassar,	1 Dokumen	13.130.000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Makassar,	1 Dokumen	13.130.000
3.28.03.1.04.00 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan,	76 Ha	1.049.152.000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan,	76 Ha	1.049.152.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,					Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,		
3.28.03.1.04.00 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	200 ha	1.269.196.918	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	200 ha	1.269.196.918
3.28.03.1.04.00 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Makassar,	1 Laporan	16.660.000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Makassar,	1 Laporan	16.660.000
3.28.03.1.04.00 09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	50 Ha	167.997.000	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	50 Ha	167.997.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan		1780029 ha	262.555.000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan		1780029 ha	262.555.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.28.03.1.05.00 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Parepare, Takalar, Bulukumba	1780029 ha	237.885.000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Parepare, Takalar, Bulukumba	1780029 ha	237.885.000
3.28.03.1.05.00 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Wajo	2 Operasi	340.000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Wajo	2 Operasi	340.000
3.28.03.1.05.00 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Makassar,	24 Laporan	24.330.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Makassar,	24 Laporan	24.330.000
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan		40000 m3	2.710.000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan		40000 m3	2.710.000
3.28.03.1.07.00 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Makassar,	1 Dokumen	2.710.000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Makassar,	1 Dokumen	2.710.000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan		70%	70.105.000	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan		70%	70.105.000
3.28.03.1.09.00 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pegedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih,	Makassar,	3 Unit Usaha	15.310.000	Penetapan Pengadaan Benih dan Pegedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih,	Makassar,	3 Unit Usaha	15.310.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi					Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi			
3.28.03.1.09.00 02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Makassar,	3 Sertifikat	7.610.000	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Makassar,	3 Sertifikat	7.610.000
3.28.03.1.09.00 04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan		3 Sertifikat	15.310.000	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan		3 Sertifikat	15.310.000
3.28.03.1.09.00 06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Pinrang, Jeneponto	2 Ha	31.875.000	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Pinrang, Jeneponto	2 Ha	31.875.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata		1 Laporan	18.895.000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata		1 Laporan	18.895.000
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES		1 Laporan	18.895.000	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES		1 Laporan	18.895.000
3.28.04.1.02.00 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Makassar,	1 Laporan	18.895.000	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Makassar,	1 Laporan	18.895.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH		1,75%	31.219.600	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH		1,75%	31.219.600
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya		24 Kelompok	31.219.600	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya		24 Kelompok	31.219.600
		Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi		4 Kelompok			Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi		4 Kelompok	
3.28.05.1.01.00 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Makassar,	243 Orang	30.193.600	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Makassar,	243 Orang	30.193.600



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan					Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				
3.28.05.1.01.00 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Makassar,	2 Kelompok	823.400	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Makassar,	2 Kelompok	823.400
3.28.05.1.01.00 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Makassar,	2000 ha	202.600	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Makassar,	2000 ha	202.600
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif		20,83%	9.525.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif		20,83%	9.525.000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota		21%	9.525.000	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota		21%	9.525.000
3.28.06.1.01.00 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Makassar,	4 Dokumen	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Makassar,	4 Dokumen	-
3.28.06.1.01.00 05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Makassar,	1 Lembaga	9.525.000	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Makassar,	1 Lembaga	9.525.000
	UPT. Pengelolaan Limbah B3					UPT. Pengelolaan Limbah B3				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP			4.485.608.735	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP			4.485.608.735
2.11.01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				4.485.608.735	Peningkatan Pelayanan BLUD				4.485.608.735
2.11.01.10.000 1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 Unit Kerja	4.485.608.735	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 Unit Kerja	4.485.608.735
JUMLAH					155.415.898.484,88					155.415.898.484,88



2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditentukan dari prosesnya, diantaranya melalui pendekatan *bottom up* dimana perencanaan yang dilakukan dari penjaringan aspirasi masyarakat pemberi gagasan awal terkait kebutuhan nyata pada tingkat masyarakat dan penerima dampak kegiatan pembangunan yang direncanakan. Hasil penjaringan ini, dibahas secara berjenjang mulai dari murenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten serta musrenbang provinsi. Hasil penjaringan aspirasi kebutuhan suatu daerah yang menjadi kewenangan provinsi diusulkan melalui Rakortek provinsi sebagai media penyelasaran usulan berdasarkan kewenangan pengelolaan urusan masing-masing bidang pembangunan

Table 5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara	5 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Selayar	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara	10 ha	Rehabilitasi tanaman mangrove
		Gowa	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara	20 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Kec. Wattang sidenreng	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara	10 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Barru	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara	10 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Maros	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara	10 ha	Rehabilitasi mangrove
		Maros	Luas penanaman di luar kawasan hutan negara	10 ha	Pembuatan hutan rakyat
2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehatl) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Maros	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	1 unit	Renovasi kantor dan penataan kawasan taman
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pangkep, Toraja Utara, Palopo, Tana Toraja	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH	4 lokasi	Pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	Pangkep	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sasaran jangka menengah ditetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Penekanan prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 melalui 1) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 2) Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. 3) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan 6) Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

Rancangan Tema RKP tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.



Sasaran pembangunan tahun 2024 mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Menyelaraskan tema pembangunan RKP dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi, maka penyandingan target sasaran dan indikator sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target RKP	Target RKPD	Satuan
Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan	pertumbuhan ekonomi	5,3 -5,7	5,23-6,71	Persen
	tingkat pengangguran terbuka	5,0-5,7	4,24	Persen
	rasio gini	0,374-0,377	0,361	Nilai
	penurunan emisi gas rumah kaca	27,27		Persen
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif	indeks pembangunan manusia	73,99-74,02	73,99	Nilai
	tingkat kemiskinan	6,5 - 7,5	8,31	Persen

3.2 Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait pembangunan sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Adapun sasaran strategis kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :



1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Target sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2024
Sasaran 1 : Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,74
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	17,54
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,31
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	70
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	230



IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2024
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Values</i>)	Juta ha	18,20
Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp trilyun	115
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	US \$ Milyar	16
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp trilyun	5,5
Sasaran 3 : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
10	Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	3
11	Luas Kawasan hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Ribu ha	600
12	Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	500
Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing			
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan	Poin	2,5
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Kasus	3.220
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,70

3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024 - 2026 dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2024-2026). Sasaran ini juga juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024- 2026 berdasarkan Tujuan, dijabarkan sebagai berikut:



1. Tujuan 1 adalah Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, dengan rumusan sasaran sebagai berikut
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
 - b. Optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Tujuan 2 adalah Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Tujuan 3 adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja
 - b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas
 - c. Menurunnya angka kemiskinan
 - d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
 - e. Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
4. Tujuan 4 adalah: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana, dengan rumusan sasaran sebagai berikut
 - a. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Tahun 2024 ditetapkan tema pembangunan daerah yaitu:

“ Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif”

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional



Tabel 7

Target kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Target Kinerja tahun 2024	Target Perubahan Kinerja tahun 2024
1	Peningkatan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	67,31 (B)	74,56 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai Sakip Provinsi	68,52 (B)	69
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	A- (4,01 - 4,50)	A- (4,34 - 4,50)
2	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamsom	0,67	0,524
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	81,97	81,97
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas total daerah	84.248.042,86	84.248.042,86
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	7	Pertumbuhan ekonomi	5,5-6,90	5,5-6,90
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB perkapita ADHB	70,7	70,7
			9	Rasio Gini	0,362-0,363	0,362-0,363
		Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	10	Tingkat pengangguran terbuka	4,24	4,24
		Menurunnya angka kemiskinan	11	Tingkat kemiskinan	6,7-7,7	6,7-7,7
		Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	12	IPM	73,99-74,02	73,99-74,02
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65	93,65
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	14	IKLH	73,57	74,36
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi penurunan emisi GRK (juta tin CO2eq)	1.823.583	1.823.583

3.4 Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian RPD tahun 2024-2026 pada :



Tabel 8
Keterkaitan RPD dan Renstra

No.	RPD		Renstra	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan	Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Meningkatnya perbaikan lingkungan hidup
				Menurunnya emisi GRK sektor limbah
			Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan
				Terpeliharanya fungsi hutan
				Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan
				Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan kepada tujuan RPD, prioritas isu-isu strategis, serta memperhatikan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan, 2) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 3) Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Renja Pokok	Target Perubahan Renja
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Kategori reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	B	B
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB (77,40)	BB (78,80)
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		Persentase kelembagaan masyarakat dibidang kehutanan yang diberdayakan	Persen	0,14	0,14



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Renja Pokok	Target Perubahan Renja
	Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri	Persentase kelompok tani mandiri	Persen	3,32	3,32
Menurunkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatkan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,57	74,36
	Meningkanya perbaikan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	57,03	57,03
		Indeks Kualitas udara	Nilai	89,45	89,45
		Indeks Kualitas Air Laut	Nilai	85,68	85,68
		Persentase beban pencemaran dari sumber tertentu	Persen	27,35	27,35
	Meningkatnya potensi penurunan emisi GRK sektor limbah	Persentase potensi penurunan emisi GRK sektor limbah	Persen	0,26	0,26
Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	55,49	55,49
		Tata kelola hutan yang berkelanjutan	Persen	5,40	5,40
	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Jumlah emisi penurunan GRK sektor kehutanan	Ton CO ₂ Eq	242.052	98.572
		Rekomendasi pemulihan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dan atau dalam daerah kabupaten/ kota	Rekomendasi	1	1
	Terpeliharanya fungsi hutan	Persentase kawasan hutan kewenangan provinsi yang dipertahankan fungsinya	Persen	99,98	99,98
	Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan	Persentase akses kelompok masyarakat dan swasta yang melakukan usaha kehutanan	Persen	3,10	3,10
	Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi	Persen	27,08	27,08

3.5 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 mencakup 15 (lima belas) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk pemenuhan perencanaan lingkungan hidup terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi



2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, dengan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menurunkan potensi pencemaran lingkungan dari limbah dan peningkatan perbaikan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program pengelolaan keanekaragaman hayati bertujuan untuk meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan sub kegiatan
 - a. Sub kegiatan pengelolaan Kebun Raya

IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) bertujuan untuk mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) yang berasal dari aktivitas industri dan medis. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsim, dengan sub kegiatan
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

V. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan ketaatan badan usaha terhadap kewajiban izin kegiatan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH bertujuan untuk fasilitasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat/ lembaga kemasyarakatan tentang lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan
 - a. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat bertujuan pemberian apresiasi dan motivasi kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi atas kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup bertujuan untuk penyelesaian permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
 - b. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

X. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan bertujuan untuk pengembangan penanganan sampah di TPA/TPS regional. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

XI. Program Pengelolaan Hutan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan alam produksi secara berkelanjutan dan lestari dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan



2. Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
4. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 - b. Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - c. Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 - d. Sub kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
 - e. Sub kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
5. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - a. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
 - b. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
 - c. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - a. Sub kegiatan x` dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
7. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
 - a. Sub kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
 - b. Sub kegiatan Sertifikasi Sumber Benih
 - c. Sub kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit
 - d. Sub kegiatan Pembangunan Sumber Benih

XII. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

XIII. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan melalui pemberian peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan dengan kegiatan sebagai berikut. :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
 - b. Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - c. Sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

XIV. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Program ini bertujuan pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi lainnya sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial secara optimal dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
 - b. Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

XV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pihak dan kesiap-siagaan personil dan peralatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menurunkan jumlah titik api (hotspot) dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD



- f. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - e. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program dan kegiatan tersebut diatas, merupakan program dan kegiatan yang juga mendukung program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2024, bersumber dari dana APBD, DBH, DAK.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kehutanan.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran *menurunnya angka kemiskinan*, dan sasaran *meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan* serta sasaran *terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pembangunan* yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2024

Rencana kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi tahun 2024, sebagai berikut :



Tabel 11 (TC-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						7.049.080.884	6.108.756.245	- 940.324.639		
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						7.049.080.884	6.108.756.245	- 940.324.639		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup			66,67%	66,67%	307.517.300	375.996.000	68.478.700		
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH			60%	60%	49.998.800	37.456.000	- 12.542.800		
2.11.02.1.01.00 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	3 Dokumen	3 Dokumen	49.998.800	37.456.000	- 12.542.800	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan			100 %	100 %	257.518.500	338.540.000	81.021.500		
2.11.02.1.02.00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Makassar	Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	257.518.500	338.540.000	81.021.500	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi emisi GRK dari sektor limbah			15257.36 TonCO ₂ eq	15257.36 TonCO ₂ eq	703.619.800	1.112.600.110	408.980.310		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH			24 kabupaten/ kota	24 kabupaten/ kota	703.619.800	1.112.600.110	408.980.310		
2.11.03.1.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Makassar	Sulawesi Selatan	3 Dokumen	3 Dokumen	175.004.800	39.046.200	- 135.958.600	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.03.1.01.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Makassar	Sulawesi Selatan	3 Dokumen	3 Dokumen	58.930.000	15.680.000	- 43.250.000	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.03.1.01.00 15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Makassar	Makassar	1200 Dokumen	1000 Dokumen	469.685.000	1.057.873.910	588.188.910	Instansi Pemerintah	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)			88,24%	88,24%	567.964.884	25.047.600	- 542.917.284		
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola			375 Jenis	375 Jenis	567.964.884	25.047.600	- 542.917.284		
2.11.04.1.01.00 03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Maros	Maros	27 ha	27 ha	567.964.884	25.047.600	- 542.917.284		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah yang dikelola					4.700.000.000	20.611.100	- 4.679.388.900		
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3			2.200.000 Ton	2.200.000 Ton	4.700.000.000	20.611.100	- 4.679.388.900		
2.11.05.1.01.00 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar	Makassar	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	20.611.100	- 79.388.900	Instansi Pemerintah , Swasta	PAD
2.11.05.1.01.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Makassar, Sulawesi Selatan	-	250 Dokumen	250 Dokumen	4.600.000.000	-	- 4.600.000.000	Instansi Pemerintah , Swasta	PAD
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan pemarkarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH			40%	40%	215.002.700	22.607.200	- 192.395.500		
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			60 Usaha/ Kegiatan	60 Usaha/ Kegiatan	215.002.700	22.607.200	- 192.395.500		
2.11.06.1.01.00 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan	Makassar	Makassar	10 Dokumen	10 Dokumen	50.002.700	12.632.000	- 37.370.700	Instansi Pemerintah , Swasta	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
	Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Surat Kelayakan operasi yang diberikan									
2.11.06.1.01.00 06	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Makassar	Makassar	150 Badan Usaha	150 Badan Usaha	165.000.000	9.975.200	- 155.024.800	Instansi Pemerintah , Swasta	PAD
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			33,33 %	33,33 %	69.937.600	795.700	- 69.141.900		
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan			5 Masyarakat Hukum Adat	5 Masyarakat Hukum Adat	69.937.600	795.700	- 69.141.900		
2.11.07.1.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Makassar	Makassar	5 Dokumen	3 Dokumen	69.937.600	795.700	- 69.141.900	Instansi Pemerintah , Masyarakat	PAD
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH			73,4 %	73,4 %	106.403.800	19.230.000	- 87.173.800		
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH			1104 lembaga	1104 lembaga	106.403.800	19.230.000	- 87.173.800	Instansi Pemerintah Masyarakat	PAD
2.11.08.1.01.00 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Makassar	Makassar	24 Dokumen	14 Dokumen	106.403.800	19.230.000	- 87.173.800		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup			88,23 %	88,23 %	74.154.800	15.045.000	- 59.109.800		
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			150 penghargaan	150 penghargaan	74.154.800	15.045.000	- 59.109.800		
2.11.09.1.01.00 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Makassar	Sulawesi Selatan	150 Entitas	150 Entitas	74.154.800	15.045.000	- 59.109.800	Instansi Pemerintah , Swasta, Lembaga Masyarakat	PAD
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			100%	100%	177.480.000	11.970.000	- 165.510.000		
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjuti kasus/ perkara LH yang ditangani			30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	177.480.000	11.970.000	- 165.510.000		
2.11.10.1.01.00 03	Penerapan sanksi administratif yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Makassae	Makassae	15 Perkara	15 Perkara	100.000.000	5.230.000	- 94.770.000	Instansi Pemerintah , Swasta, Masyarakat	PAD
2.11.10.1.01.00 07	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Makassae	Makassae	15 Pengaduan	15 Pengaduan	77.480.000	6.740.000	- 70.740.000	Instansi Pemerintah , Swasta, Masyarakat	PAD
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani			55%	55%	127.000.000	19.244.800	- 107.755.200		
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional			30%	30%	127.000.000	19.244.800	- 107.755.200		
2.11.11.1.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Makassar	Makassar	3 Dokumen	3 Dokumen	127.000.000	19.244.800	- 107.755.200	Instansi Pemerintah ,	PAD
3	Urusan Pemerintahan Pilihan						33.904.707.950	149.307.142.240	15.402.434.290		
03.28	Urusan Pemerintaha Bidang Kehutanan						33.904.707.950	149.307.142.240	15.402.434.290		
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah			95 %	95 %	26.430.056.270	145.876.948.222	19.446.891.952		
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah			95 %	95 %					



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
		Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti			95 %	95 %					
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25 Dokumen	25 Dokumen	850.000.000	402.618.800	- 447.381.200		
3.28.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	370.000.000	211.313.100	- 158.686.900	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	96.820.200	- 3.179.800	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	12.760.000	- 12.240.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	14.825.500	- 10.174.500	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	9.825.000	- 15.175.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Makassar	15 Laporan	15 Laporan	25.000.000	7.207.000	- 17.793.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Makassar	4 Laporan	4 Laporan	280.000.000	49.868.000	- 230.132.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15 Laporan	15 Laporan	106.624.839.259	128.324.724.487,88	21.699.885.229		
3.28.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Makassar	897 Orang/Bulan	897 Orang/Bulan	106.250.113.259	128.138.177.787,88	21.888.064.529	ASN	PAD
3.28.01.1.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Makassar	24 Dokumen	24 Dokumen	63.500.000	52.100.000	- 11.400.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Makassar	1 Laporan	1 Laporan	64.160.000	-	- 64.160.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Makassar	Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	60.330.000	- 89.670.000	Instansi Pemerintah	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
3.28.01.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Makassar	12 Laporan	12 Laporan	97.066.000	74.116.700	- 22.949.300	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah			6 Laporan	6 Laporan	259.691.100	34.357.400	- 225.333.700		
3.28.01.1.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Makassar	4 Dokumen	4 Dokumen	2.207.400	-	2.207.400	Instansi Pemerintah	
3.28.01.1.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Makassar	6 Dokumen	6 Dokumen	180.150.000	30.970.000	- 149.180.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.03.00 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Makassar	2 Laporan	2 Laporan	67.490.000	2.750.000	- 64.740.000	Instansi Pemerintah	
3.28.01.1.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Makassar	2 Laporan	2 Laporan	4.495.000	427.200	- 4.067.800	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Makassar	4 Laporan	4 Laporan	5.348.700	210.200	- 5.138.500	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5 Laporan	5 Laporan	114.030.000	45.875.000	- 68.155.000		
3.28.01.1.05.00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Makassar	2 Unit	2 Unit	24.000.000	15.370.000	- 8.630.000	ASN	
3.28.01.1.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	90.030.000	30.505.000	- 59.525.000	ASN	PAD
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7 Laporan	7 Laporan	3.673.280.700	3.192.572.500	- 480.708.200		
3.28.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo,	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo,	1 Paket	1 Paket	47.969.500	1.210.500	- 46.759.000	Instansi Pemerintah	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
			Luwu Utara, Luwu Timur,	Luwu Utara, Luwu Timur,							
3.28.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	1 Paket	1 Paket	851.688.800	2.363.108.000	1.511.419.200	Instansi Pemerintah	
3.28.01.1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	3 Paket	3 Paket	733.848.400	227.479.500	- 506.368.900	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	5 Paket	5 Paket	263.082.500	87.442.400	- 175.640.100	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Makassar	Makassar	12 Laporan	12 Laporan	57.495.000	22.716.300	- 34.778.700	Instansi Pemerintah	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
3.28.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	180 Laporan	180 Laporan	1.706.582.100	488.688.800	- 1.217.893.300	Instansi Pemerintah ,	PAD
3.28.01.1.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	12.614.400	1.927.000	- 10.687.400	Instansi Pemerintah ,	PAD
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			6 Unit	6 Unit	131.830.000	340.727.000	208.897.000		
3.28.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	Makassar	2 Paket	2 Paket	131.830.000	340.727.000	208.897.000	Instansi Pemerintah ,	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4 Laporan	4 Laporan	10.074.942.504	12.235.737.632	2.160.795.128		
3.28.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Makassar	4 Laporan	4 Laporan	5.500.000	330.000	- 5.170.000	Instansi Pemerintah ,	PAD
3.28.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	Makassar	12 Laporan	12 Laporan	881.882.000	746.743.996	- 135.138.004	Instansi Pemerintah ,	PAD
3.28.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	Makassar	12 Laporan	12 Laporan	9.187.560.504	11.488.663.636	2.301.103.132	Instansi Pemerintah ,	PAD
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			6 Laporan	6 Laporan	4.701.442.707	1.300.335.402	- 3.401.107.305		
3.28.01.1.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar	Makassar	31 Unit	31 Unit	3.768.246.707	297.340.000	- 3.470.906.707	Instansi Pemerintah ,	PAD
3.28.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	Makassar	165 Unit	165 Unit	543.621.000	936.565.402	392.944.402	Instansi Pemerintah ,	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
3.28.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar	Makassar	30 Unit	30 Unit	65.275.000	9.630.000	- 55.645.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.09.00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Makassar,	Makassar,	1 Unit	1 Unit	20.000.000	-	- 20.000.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Soppeng	Makassar, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Soppeng	8 Unit	8 Unit	249.300.000	56.800.000	- 192.500.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.01.1.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar,	Makassar,	10 Unit	10 Unit	55.000.000	-	- 55.000.000	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu			21 %	21 %	6.927.847.280	3.370.554.418	- 3.557.292.862		
		Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi			11,91 %	11,91 %					
		Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan			0,03 %	0,03 %					
		Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara			3,57 %	3,57 %					
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran					62.413.000	518.603.500	456.190.500		
3.28.03.1.01.00 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Makassar,	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	1 Dokumen	62.413.000	518.603.500	456.190.500	Instansi Pemerintah	PAD
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan			100%	100%	122.775.000	145.000	- 122.630.000		
3.28.03.1.02.00 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Makassar,	Sulawesi Selatan	24 Dokumen	24 Dokumen	122.775.000	145.000	- 122.630.000	Instansi Pemerintah	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			43.000 M3	43.000 M3	99.180.000	300.000	- 98.880.000		
		Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			4.000 Ton	4.000 Ton					



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
3.28.03.1.03.00 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Makassar,	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	1 Dokumen	99.180.000	300.000	- 98.880.000	Instansi Pemerintah , Swasta	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman			167 ha	167 ha	4.435.235.880	2.516.135.918	- 1.919.099.962		
3.28.03.1.04.00 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Makassar,	Makassar,	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	13.130.000	- 36.870.000	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04.00 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	76 Ha	76 Ha	3.405.265.880	1.049.152.000	- 2.356.113.880	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04.00 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	200 ha	200 ha	451.000.000	1.269.196.918	818.196.918	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
3.28.03.1.04.00 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Makassar,	Sulawesi Selatan	1 Laporan	1 Laporan	83.950.000	16.660.000	- 67.290.000	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04.00 09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	50 Ha	50 Ha	445.020.000	167.997.000	- 277.023.000	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan			1780029 ha	1780029 ha	1.835.724.400	262.555.000	- 1.573.169.400		
3.28.03.1.05.00 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Parepare, Takalar, Bulukumba	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Parepare, Takalar, Bulukumba	1780029 ha	1780029 ha	1.788.994.400	237.885.000	- 1.551.109.400	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.05.00 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Wajo	Sulawesi Selatan	2 Operasi	2 Operasi	4.250.000	340.000	- 3.910.000	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
3.28.03.1.05.00 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Makassar,	Sulawesi Selatan	24 Laporan	24 Laporan	42.480.000	24.330.000	- 18.150.000	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan			40000 m3	40000 m3	112.625.000	2.710.000	- 109.915.000		
3.28.03.1.07.00 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPBH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Makassar,	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	1 Dokumen	112.625.000	2.710.000	- 109.915.000	IPHHK, Swasta, kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan			70%	70%	259.894.000	70.105.000	- 189.789.000		
3.28.03.1.09.00 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Makassar,	Sulawesi Selatan	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	40.000.000	15.310.000	- 24.690.000	Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.09.00 02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Makassar,	Sulawesi Selatan	3 Sertifikat	3 Sertifikat	40.000.000	7.610.000	- 32.390.000	Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.09.00 04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan			3 Sertifikat	3 Sertifikat	40.000.000	15.310.000	- 24.690.000	Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.09.00 06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Pinrang, Jeneponto	Pinrang, Jeneponto	2 Ha	2 Ha	139.894.000	31.875.000	- 108.019.000	Kelompok Masyarakat	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata			1 Laporan	1 Laporan	55.050.000	18.895.000	- 36.155.000		
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES			1 Laporan	1 Laporan	55.050.000	18.895.000	- 36.155.000		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
3.28.04.1.02.00 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Makassar,	Sulawesi Selatan	1 Laporan	1 Laporan	55.050.000	18.895.000	- 36.155.000	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH			1,75%	1,75%	334.504.400	31.219.600	- 303.284.800		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya			24 Kelompok	24 Kelompok	334.504.400	31.219.600	- 303.284.800		
		Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi			4 Kelompok	4 Kelompok					
3.28.05.1.01.00 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Makassar,	Makassar,	243 Orang	243 Orang	65.160.400	30.193.600	- 34.966.800	Masyarakat, penyuluh kehutanan	PAD
3.28.05.1.01.00 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Makassar,	Luwu Utara, Pangkep	33 Kelompok	2 Kelompok	221.974.800	823.400	- 221.151.400	Kelompok Tani Hutan	PAD
3.28.05.1.01.00 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Makassar,	Sulawesi Selatan	2000 ha	2000 ha	47.369.200	202.600	- 47.166.600	Instansi Pemerintah , Swasta kelompok masyarakat, penyuluh kehutanan	PAD
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif			20,83%	20,83%	157.250.000	9.525.000	- 147.725.000		
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota			21%	21%	157.250.000	9.525.000	- 147.725.000		
3.28.06.1.01.00 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Makassar,	Makassar,	4 Dokumen	4 Dokumen	97.400.000	-	- 97.400.000	Instansi Pemerintah ,	PAD
3.28.06.1.01.00 05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Makassar,	Makassar,	1 Lembaga	1 Lembaga	59.850.000	9.525.000	- 50.325.000	Instansi Pemerintah ,	PAD
2.11.01	UPT. Pengelolaan Limbah B3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berenergi baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP					-	4.485.608.735	4.485.608.735		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)		
2.11.01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						-	4.485.608.735	4.485.608.735		
2.11.01.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			-	1 Unit Kerja	-	4.485.608.735	4.485.608.735	Instansi Pemerintah	PAD
JUMLAH							140.953.788.834	155.415.898.484,88	14.462.109.650,88		



Dari tabel TC-33 di atas, diuraikan lebih lanjut program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender dan mitigasi perubahan iklim, serta penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca, deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan usahawana tani.

Program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender pada tahun 2024 yaitu:

1. Program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan (Program Prioritas)
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan di bidang kehutanan, dengan rencana aksi melalui
 - Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang Kehutanan
 - Pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan
 - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial
2. Program Pengelolaan Hutan (Program Prioritas)
 - a. Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dengan rencana aksi melalui
 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan

Program dan kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pada tahun 2024

1. Program Pengelolaan Hutan
 - a. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan melalui
 - Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)
 - Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara
 - Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara
 - Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan
 - b. Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, melalui
 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan
 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Program Prioritas)
 - a. Kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui
 - Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS



- Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - a. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati, melalui :
 - Pengelolaan Kebun Raya
- 4. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
- 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 7. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat hutan untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024

1. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sasaran kinerja dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Rencana kerja tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut, dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penganggaran dan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan strategis tahunan agar tercipta konsistensi dokumen
2. Melaksanakan rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Melakukan pengendalian dan pemantauan rencana kerja secara periodik (triwulan, semester)

5.2 Rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKAp dan DpPA tahun 2024) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

Selain itu rencana kerja 2024 menjadi pedoman dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.